



KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 TINJAUAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia	4
1.3 Reformasi di Bidang Keuangan Negara	13
1.4 Perbedaan Basis Akrual dan Basis Kas	16
1.5 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Akrual	19
1.6 Anggaran Basis Akrual dan Anggaran Basis Kas	25
1.7 Sistem Akuntansi Kas Menuju Akrual	28
1.8 Rekomendasi Penerapan Basis Akrual	31
1.9 Peluang dan Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia	34
BAB 2 IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH INDONESIA	37
2.1 Pendahuluan	37
2.2 Langkah Penerapan Basis Akrual di Indonesia	39
2.3 Tantangan dan Kesulitan Akuntansi Berbasis Akrual	44

2.4	Sejauh Mana Kesiapan Pemerintah Pusat/Daerah dalam Penerapan Basis Akrual	47
2.5	Trend Penilaian BPK yang Terus Meningkat	51
2.6	Pengalaman atau Praktik Akuntansi Berbasis Akrual di Dunia Internasional	53
BAB 3	LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL	59
3.1	Pendahuluan	59
3.2	Perubahan Basis Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	61
3.3	Strategi Penerapan Akuntansi Basis Akrual	62
3.4	Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda Semakin Membaik	65
BAB 4	REFORMASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (REFORMASI SPAN)	73
4.1	Pendahuluan	73
4.2	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	82
4.3	Koneksitas SPAN dan SAKTI	88
BAB 5	PROSES BISNIS SPAN DAN SAKTI	95
5.1	Pendahuluan	95
5.2	Penganggaran	97
5.3	Pelaksanaan Anggaran	107
5.4	Managemen Komitmen	110
5.5	Managemen Pembayaran	118
5.6	Managemen Penerimaan	124
5.7	Managemen Kas	131
5.8	Pertanggung Jawaban	133
BAB 6	AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA SPAN	139
6.1	Pengertian dan Konsep Dasar	139
6.2	Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan	140
6.3	Teknologi dan Informasi SPAN	164
BAB 7	PENUTUP	165

DAFTAR VOCABULARY		177
DAFTAR PUSTAKA		167
LAMPIRAN		179
Lampiran 1	Peraturan Menkeu No.238/PMK .05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan	181
Lampiran 2	Peraturan Menkeu No.154/PMK. 05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara	189
Lampiran 3	Peraturan Menkeu Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	261
Gambar 4.1	Garis Besar Flow Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi	87
Gambar 4.2	Interaksi SAKTI dengan SPAN	89
Gambar 4.3	Interaksi Aplikasi Satker dengan SPAN	89
Gambar 4.4	Arsitektur Aplikasi Portal SPAN	90
Gambar 4.5	Arsitektur Aplikasi SPAN-SMS Service	92
Gambar 5.1	Mekanisme Penyelesaian Revisi Anggaran pada Kanwil DIJEN Perbendaharaan	99
Gambar 5.2	Mekanisme Penyelesaian Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran	100
Gambar 5.3	Mekanisme Penyelesaian Revisi pada Unit Eselon I Kementerian/Lembaga	101
Gambar 5.4	Penganggaran SPAN-SAKTI	102
Gambar 5.5	Gambaran Umum Fitur-fitur Modul Penganggaran pada SAKTI	106
Gambar 5.6	Koneksitas Modul Pelaksanaan Anggaran Aplikasi Satker-SPAN	108
Gambar 5.7	Koneksitas Proses Bisnis Manajemen Komitmen dengan Proses Bisnis Lain	111
Gambar 5.8	Keterkaitan Data Suplier dengan RFC dan Resume Tagihan	118